BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengelolaan Anggaran

Dalam penelitiannya Debi (2015) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan semua anggota di sebuah organisasi. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Terdapat banyak pengertian tentang anggaran, menurut *the National Committee on Governmental Accounting* menyimpulkan bahwa anggaran meliputi renacana pengeluaran / belanja dan rencana penerimaan / pembiayaan belanja mencakup jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial (Deby, 2015). Lain halnya menurut Irna (2015) anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mengestimasi kinerja di masa yang akan datang. Anggaran perbelanjaan Daerah (APBD) menurut pasal 1 UU No.32 tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Desak Nyoman dkk (2015) dalam penelitiannya menegaskan bahwa Anggaran yang baik akan menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan. Hal ini didukung oleh Irna (2017) yang menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mengestimasi kinerja di masa yang akan datang.

Pengelolaan anggaran (APBD) yang baik merupakan penerapan prinsip *Value for Money* (*VfM*) dan mutlak dilakukan pembuat anggaran dalam hal ini adalah eksekutif. Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik khususnya dalam hal penganggaran sektor publik (Rosalina,2012). *Good governance* akan terwujud jika anggaran dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Penerapan *good governance* tidak terlepas dari adanya prinsip akuntabilitas. Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah, selain itu tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan anggaran yang juga menjadi faktor penting yaitu ketepatan waktu. Sebuah anggaran dituntut juga dalam halnya ketepatan waktu dimana diharapkan adanya komunikasi informasi

secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan internal). Perlu adanya pengawasan internal yang baik dalam pengelolaan sebuah anggaran untuk mengetahui atau mengevaluasi kinerja anggaran agar kinerja dapat berjalan dengan baik.

2.1.2 Konsep *Value For Money*

Sistem pengelolaan anggran berkonsep *Value for Money* (*VfM*) didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi,dan efektivitas. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya masukan yang paling kecil untuk mencapai keluaran yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Muindro Renyowijoyo, 2010). Pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:pertama, ekonomi merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah dengan arti lain bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya) dan terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang yang digunakan yang digunakan, dengan menghindari pengeluarannya. *Good governance* akan terwujud jika anggaran dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Penerapan *good governance* tidak terlepas dari adanya

Pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* atau pengawasan atas kinerja output. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien. Prinsip akuntabilitas secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah, selain itu tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan anggaran yang juga menjadi faktor penting yaitu ketepatan waktu. Sebuah anggaran dituntut juga dalam halnya ketepatan waktu dimana diharapkan adanya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan internal). Perlu adanya pengawasan internal yang baik dalam pengelolaan sebuah anggaran untuk mengetahui atau mengevaluasi kinerja anggaran agar kinerja dapat berjalan dengan baik.

Kedua, efisisensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisisensi merupakan perbandingan keluaran/masuakan (output/input).

Pengukuran *value for money* dapat dilakukan dengan empat langkah yaitu:

a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi yaitu biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan, biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan biaya organisasi lain yang sejenis, dan penggunaan sumber daya finansial secara optimal.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep *Value for Money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Jadi dapat disimpulkan apabila semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

c. Pengkuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya diperbolehkan melebihi yang telah dianggarkan, bisa dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah atau belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* nilainya akan lebih tinggi daripada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

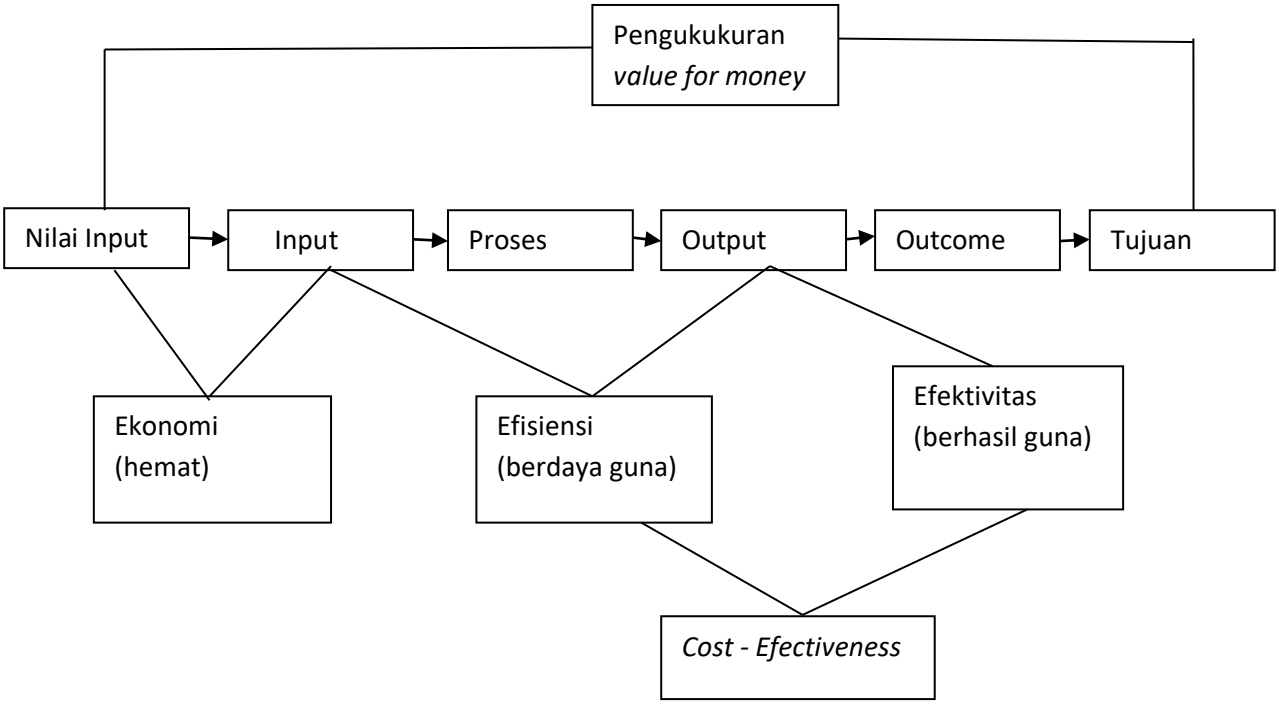

Gambar 2.1

Pengukuran Kinerja *Value for Money*

(Sumber : Muindro Renyowijoyo, 2010)

a. Masukan *(input)*

Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

b. Keluaran *(output)*

Keluaran merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Harus diingat pula keluaran yang diinginkan, dan keluaran lainnya yang tidak diinginkan yang merupakan efek samping.

c. Sasaran Utama *(throughput)*

Analisis *Value For Money* memerlukan data masukan dan keluaran yang memadai. Masalahnya adalah tidak tersedianya data keluaran yang lengkap, sehingga sulit mengukur data keluaran. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digunakan keluaran antara (*inetrmediate output*) atau indikator kinerja (*performance indicator*).

d. Pencapaian hasil *(Outcome)*

Hasil adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, biasanya dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang menyebabkan *outcome* sulit ditetapkan atau diukur yaitu:

1. Tidak dapat dijelaskan dengan sederhana yang memudahkan monitoring.
2. Adanya masalah politik dalam proses penetapan *outcome*, tergantung penguasa.
3. Penentuan *outcome* perlu pertimbanagan kualitas, output meningkat, lebih ekonomis dan efisien, atau sudah berkualitas.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik (Harryanto dkk, 2007:9), antara lain:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik

2.1.3 Konsep *Good Governance*

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai sebagai cara mengelola urusan publik dan sering juga diartikan sebagai kepemerintahan yang baik (Muindro Renyowijoyo, 2010). *World Bank dan United Nation Development Program (UNDP)* mendefenisikan *governance* dalam arti yang berbeda. *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyrakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.

Good governance ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan

pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. *Good governance* muncul akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan bahwa tidak adanya iklim pemerintah yang baik dan didorong dalam reformasi sektor publik. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah "*good governance*" telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN).

Dasar hukum *good governance* pada institusi pemerintah Indonesia yang pertama adalah TAP MPR. No VII/MPR/2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih. Tujuan penerapan *good governance* dalam pemerintahan adalah agar operasi dari instansi pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan pencapaian sasaran dari perusahaan dapat tercapai (Sari dan Raharja, 2012). Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP antara lain:

1. *Participation* (partisipasi)
2. *Rule of Law* (Hukum dan Aturan)
3. *Transparancy*
4. *Rensponsiveness*
5. *Consensus orientation*
6. *Equity*
7. *Efficiency and Effectiveness*
8. *Accountability*

Menurut penelitian yang dilkaukan oleh Dedi (2009) yang menemukan bahwa penerapan *good governance* yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Faktor yang dapat mempengaruhi *good governance* dan merupakan pilar umum dari *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Selain itu terdapat *value for money* yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik.

Adapun beberapa manfaat penerapan *Good Governance* adalah :

1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik.
2. Akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat.
4. Meningkatkan kulitas laporan keuangan.

2.1.4 Akuntabilitas Publik

Fenomena perkembangan sektor publik dapat diamati dengan makin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transaparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Menurut Muindro Renyowijoyo (2015:14) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawan tersebut, sama halnya dengan Irna (2017) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah.

Sedangkan Debi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship. Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggunjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab. Hal senada diungkapkan oleh Chi-chi (2012) "*accountability is all about being answerable to those who have invested their trust, faith, and resources to you*" dan merupakan kewajiban untuk menunjukkan bahwa Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang disepakati dan petugas melaporkan secara adil dan akurat mengenai hasil kinerja

Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah (Wandari, 2015). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability)* yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
b. Akuntabilitas Horizontal *(horizontal accountability)* adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal *(horizontal accountability)*, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal *(vertical accontability)*.

Anggaran yang baik akan menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat satu set keluaran yang diinginkan. *Good governance* akan jika anggaran dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Penerapan *good governance* tidak terlepas dari adanya prinsip akuntabilitas (Wandari et al., 2015) dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Menurut Debi (2015) akuntabilitas sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri dari empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik (Muindro Renyowijoyo 2010:15) yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity ang legality*)

   Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountabilty*) terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan pertaturan yang ditetapkan.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

   Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik atau belum dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

   Akuntabilitas program untuk mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggunjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah menurut penelitian Faridah (2015), dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

   1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
   2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.5 Transparansi Publik

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi publik merupakan indikator yang sangat dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik , Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Debi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang

dicapai. Dalam penelitiannya Verena Kroth (2012) yang berjudul *Subnational Budget Transparency An Analysis of Ten Pilot Studies* menyatakan *Transparency at the subnational level is required in order to expose service delivery issues, which are a major concern in many countries. Moreover, subnational budget documents deal with items and expenditures that are particularly visible and tangible for citizens. In this sense, subnational transparency has the potential to provide answers to basic questions such as what happened to central government funds at the local level and whether plans to build a new neighborhood school, or carry out local road works were actually implemented. Although these are important questions, hardly any literature or empirical studies have specifically addressed transparency at the subnational level*. Hal ini ditegaskan oleh Suryono (2015), transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*. Melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik (Aries,dkk 2016). Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan akan praktek pelayanan publik yang transparan dalam *good governance* di tingkat pemerintahan daerah saat ini menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Mengingat bahwa sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan institusi kelembagaan pemerintah yang trnsparan dan efektif untuk melayani kebutuhan publik. Menurut Irna (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu : (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap aspek informasi. Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Transparansi tata pemerintahan memiliki indikator-indikator yang berfungsi sebagai parameter dari pelaksanaan transparansi. Indikator-indikator bagi transparansi tata pemerintahan tersebut meliputi:

a) Tersedianya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi yang mensyaratkan bahwa seluruh proses tata pemerintahan mulai dari pengorganisasian, alokasi anggaran sampai pada implementasi kegiatan harus terbuka secara penuh dan dapat dinilai dengan baik oleh masyrakat maupun stakeholders.

b) Tersedianya mekanisme yang memfasislitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik. Indikator ini berkaitan dengan bahwa sebuah peraturan dan prosedur pelayan publik harus cukup jelas dimengerti oleh pengguna jasa pelayanan publik. Aparat pelayanan publik harus memiliki kemampuan dan tersedianya mekanisme dan prosedur yang memungkinkan agar pengguna jasa pelayanan publik dapat memahami dengan jelas mulai dari persyratan, prosedur, dan waktu yang dibutuhkan dlam proses penyelenggaraan.
c) Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindak aparat publik di dalam kegiatan melayani aspirasi publik. Indikator ini mensyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka aparat pelayan publik dituntut untuk memudahkan proses pelaporan dan penyebaran informasi kepada publik dan pengguna pelayanan publik dalam setiap aspek penyelenggaraanya.

Menurut Debi (2015) Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik diman pemerintah harus memeberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang menjadi referensi penelitian yaitu:

1. Debi Putri Pertiwi (2015), tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap penegelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada istansi pemerintah (studi empiris SKPD provinsi Riau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadp pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money.*
2. I Desak Nyoman Nyoman Tri Wandi, Edy Sujana dan Made Pradana Adi Putra (2015) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Ketepatan waktu berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for*

money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng.

3. Muhammad Firdiansyah Adiwirya dan I Putu Sudana (2015) tentang akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara simultan pada anggaran kinerja SKPD Kota Denpasar. Transparansi berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar. Anggaran berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar
4. Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono dan M.Achsin (2016) tentang hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *value for money* dan good governance (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. pemahaman transpransi berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman parisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman *value for money* berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang.

5. Rezky Mulya Anugriani (2014), tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, pengawasan berpengaruh positif dan sgnifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.
6. Irna Setyaningrum (2016) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Transparansi berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Pengawasan berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Debi Putri Pertiwi (2015)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap penegelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada istansi pemerintah (studi empiris SKPD provinsi Riau)	Akuntabilitas,transparansi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran	Akuntabilitas,berpengaruh secara positif dan signifikan terhadp pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*	Meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi terhadap pengelolaan anggaran	Melakukan penelitian tentang anggaran pada satu SKPD Pemerintahan saja bukan secara keseluruhan
2	I Desak Nyoman Made	Pengaruh pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng	Akuntabilitas, transparnsi, ketepatan waktu,pengawasa, dan kinerja anggaran	akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Ketepatan waktu berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran *berkonsep value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng	Meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap penegeloalaan anggaran	Melakukan penelitian tentang pengelolaan anggaran bukan kinerja
3	Muhammad Firdiansyah Adiwirya dan I Putu Sudana (2015)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar.	Akuntabilitas,transparansi, dan anggaran berbasis kinerja	akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara simultan pada anggaran kinerja SKPD Kota Denpasar. Transparansi berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar. Anggaran berpengaruh secara simultan	Meneliti Akuntabilitas, transparansi terhadap pengelolaan anggaran	Melakukan penelitian tentang pengelolaanggaran bukan kinerja

				pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar		
4	Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, dan M.Achsin (2016)	hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *value for money* dan *good governance* (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi ,*value for money* dan *good governan Ce*	pemahaman transpransi berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman parisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman *value for money* berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang.	Meneliti tentang akuntabilitas, dan transparansi dan *value for money*	Melakukan penelitian pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran bukan pemahaman
5	Rezky Mulya Anug raini (2014)	pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone	Akuntabilitas, transparansi,pengawasan, dan kinerja anggaran	akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, pengawasan berpengaruh positif dan sgnifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.	Meneliti akuntabilitas, transparansi terhadap pengelolaan anggaran	Melakukan penelitian tentang pengelolaan anggaran bukan kinerja

2.3 Kerangka Pemikiran dan Pembangunan Hipotesis

1. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan anggaran *berkonsep value for money* pada Pemerintah Kota Batam

   Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawan tersebut (Muindro

Renyowijoyo, 2015:14). Penelitian dari Debi Putri Pertiwi (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Hal ini didukung oleh penelitian Desak Nyoman,dkk (2015) bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value *for money*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, maka semakin bagus pula pengelolaan anggran berkonsep *value for money*.

2. Pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Kota Batam

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Adanya transparansi mengakibatkan masyarakat menjadi semakin kritis dalam menanggapi setiap kejadian-kejadian yang ada, sehingga bisa digunakan sebagai alat pengendalian terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian I Desak Nyoman Tri Wandari (2015) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng, serta menurut

penelitian Muhammad Firdiansyah Adiwirya (2015), secara stimultan dan parsial transparansi berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi informasi maka semakin bagus pula kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money.*

3. Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Kota Batam

   Penerapan akuntabilitas dan tansparansi akan membuat kinerja anggaran menjadi semakin bagus, sehingga praktik inefisiensi, penyelewengan dan pemborosan anggaran dapat dihapuskan atau diminimalisir, karena kinerja organisasi dapat dinilai dan diawasi oleh publik. Hasil penelitian dari I Desak Nyoman Tri Wandi (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas dan transparansi, akan membuat kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* menjadi baik.

2.4 Paradigma penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut :

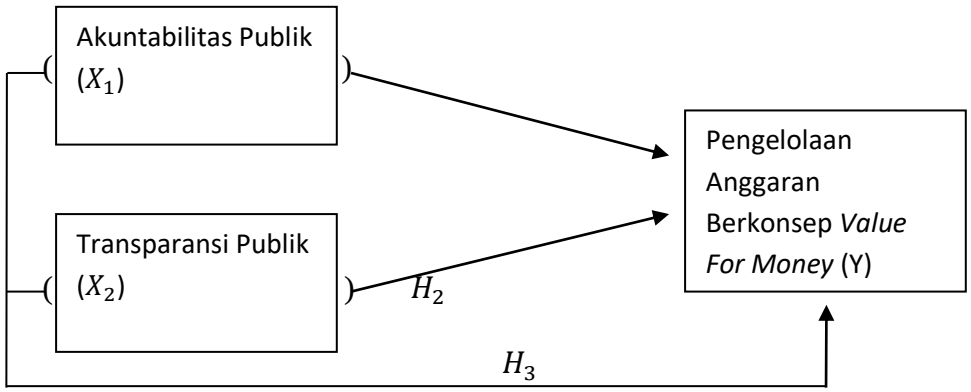

Gambar 2.2 kerangka pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada dasar tujuan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1: Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada Instansi Pemerintah Kota Batam.

H_2: Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada Instansi Pemerintah Kota Batam

H_3: Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada Instansi Pemerintah Kota Batam.